

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia menganut asas bernegara secara demokrasi. Terbukti dengan telah dilakukannya beberapa kali pemilihan umum secara langsung, baik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati. Pemilihan umum di selenggarakan sesuai dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan umum ini diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum.

Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan, Bupati dan Walikota menyebutkan bahwa yang memiliki hak memilih pada pasal 56 adalah warga yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, dan harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bagi warga yang tidak terdaftar dapat menggunakan KTP sebagai daftar pemilihan tambahan (DPTb). Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa partisipasi memilih merupakan hak bukan suatu kewajiban. Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dinilai sebagai sarana dan cermin perwujudan kembali hak dasar kedaulatan rakyat dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam melaksanakan rekrutmen pimpinan daerah untuk mewujudkan demokrasi sampai pada tingkat lokal. Secara sederhana, pilkada adalah cara individu, warga negara yang mendiami suatu daerah tertentu melakukan kontrak politik dengan orang atau partai politik yang diberi mandat menjalankan sebagai hak kewarganegaraan memilih. Dengan ikut serta berperan dalam pilkada secara tidak langsung dalam membangun pemerintah yang demokratis.

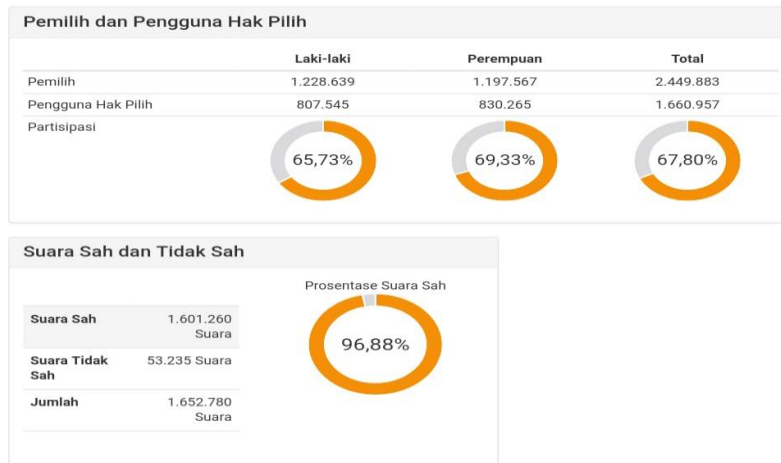
Pemilu kepala daerah atau pilkada merupakan salah satu jenis pemilihan umum yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 menyatakan bahwa pemilihan

kepala daerah dan wakilnya atau dalam istilah lebih baik. Bentuk partisipasi masyarakat terbagi atas pemberian suara, kampanye, mencari jabatan politik, dan partisipasi dalam pemungutan suara. Faktor pendorong partisipasi politik masyarakat adalah faktor lamanya tinggal, lingkungan, jumlah tempat tinggal, lingkungan, jumlah tempat pemungutan suara, dan rasa ingin tahu. Orang mengambil bagian dalam politik dengan berbagai cara. Tipe atau cara partisipasi yang dipublikasikan dan diteliti paling luas ialah pengambilan bagian dalam pemilihan umum dengan memberikan suara. Namun, terdapat kontinum kemungkinan tindakan pemilihan, dari yang paling mudah dilaksanakan sampai yang paling sukar penggunaan waktu, uang, dan energi.

Untuk membaca tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilkada, dapat dilihat dari daerah yang telah melaksanakan pesta demokrasi di antaranya Provinsi Jambi. Menurut data yang dihimpun dari Desk Pilkada Pusat dalam website KPU pilkada.2015.kpu.go.id/jambiprov, tingkat partisipasi masyarakat di Provinsi Jambi sebanyak 67,80 persen terbilang masih rendah dengan rincian jumlah pemilih yang dikeluarkan oleh KPU adalah 2.449.883 orang sedangkan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.660.957 orang dan tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 778.926 orang atau sebanyak 32,20 persen.

Adapun hasil dari pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2015 dapat dilihat melalui diagram berikut:

Diagram 1.1 Hasil pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2015



Sumber: <https://pilkada2015.kpu.go.id/jambiprov/>

Keikutsertaan masyarakat dalam memberikan hak politiknya dalam pemilu dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi adalah sosialisasi politik. Sosialisasi politik dapat mempengaruhi orang agar secara aktif dapat terlibat dalam politik, di pihak lain sosialisasi politik bisa menekan partisipasi politik. Sosialisasi politik sendiri bertujuan agar warga negara yang sudah mempunyai hak pilih mengetahui betapa politik itu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya saat pemilu berlangsung.

Menurut Rush dan Althoff (2003:25) menulis bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses, bagaimana memperkenalkan sistem politik kepada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan persepsi atau tanggapan dan reaksi-reaksinya terhadap berbagai gejala politik. Sosialisasi politik, sebagian salah satu fungsi yang melekat pada sistem politik, sedikit banyak bisa menjelaskan mengapa ada orang atau kelompok yang tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa dirinya terlibat dalam kehidupan politik. Sementara di sisi lain, ada pula orang yang mengetahui dan menyadari bahwa dirinya terlibat dalam kehidupan politik, namun yang bersangkutan bersikap pasif. Walaupun ada aktivitas politik yang dilakukan, hal itu bukan karena keinginan sendiri.

Sosialisasi politik merupakan sarana untuk memberitahukan pada seseorang mengenai konsep dan perkembangan politik serta bagaimana cara berpolitik dengan benar. Sosialisasi politik sendiri bertujuan agar warga negara yang sudah mempunyai hak pilih mengetahui betapa politik itu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sosialisasi politik itu pada hakikatnya adalah suatu bentuk proses pewarisan nilai-nilai dari generasi ke generasi. Sosialisasi politik juga merupakan suatu proses yang akan mempengaruhi setiap individu atau warga negara dalam memahami sistem politik. Hal itu berarti bahwa sosialisasi dan citra politik serta opini rakyat, karena hal itu berbentuk melalui proses pembelajaran dan pendidikan politik, baik secara langsung maupun melalui pengalaman. Hal itu merupakan proses edukasi politik atau sosialisasi politik dan pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat selaku warga Negara. Edukasi dan pembelajaran itu memungkinkan politik yang diambil oleh pemerintah atau partai politik. Demikian juga individu akan menentukan sikap dan perilakunya dalam pemilihan umum ( Anwar Arifin, 2015:74 ).

Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga yang menjadi responden di desa Sungai Bertam salah satunya adalah pak yamat. Pak Yamat mengatakan kurangnya sosialisasidikarenakan,sosialisasihanya di lakukan saat kampanye saja seperti petugas kampanye dengan cara menyuarakan pilihannyamereka, berkeliling desa dengan membawak baliho atau poster dari kandidat yang mereka pilih, ibaratnya hanya sekelibat saja jarang sekali mendapatkan pengetahuan tentang politik itu sendiri. Sosialisasi seperti ini tentunya kurang efektif karena tidak ada proses edukasi kepada warga masyarakat, sehinggabanyak masayarkat yang kurang paham mengapa mereka harus memilih dari masing-masing kandidat tersebut.Akibatnya pemahaman masyarkat terhadap sosialisasi itu sendiri bisa dibilang sangat minim terhadap sosialisasi itu sendiri.Selain itu faktor kurang tahu tersebut membuat

masyarakat awam acuh tak acuh dalam menentukan pilihannya. Tidak sedikit saat pemilu berlangsung masyarakat tidak ikut serta menggunakan hak pilihannya, mereka mementingkan pekerjaan mereka dibandingkan meluangkan waktu untuk datang menggunakan hak suaranya. Hal ini tentu saja akibat dari kurangnya sosialisasi politik itu sendiri, sehingga mereka tidak memiliki pemahaman tentang pentingnya menggunakan hak suara untuk keberlangsungan kehidupan mereka kedepannya, walaupun hal tersebut belum mereka sadari, paling tidak memilih kandidat yang hanya mereka ketahui wajahnya saja yang tidak tahu latar belakangnya atau profil kandidat yang dipilih, sehingga mudah sekali diiming-imingi dengan yang namanya money politik.

Berdasarkan pendapat di atas sosialisasi politik adalah langkah awal untuk membekali generasi penerus agar tidak buta terhadap politik, memahami struktur-struktur tempat hidupnya dan meningkatkan pemahamannya tentang politik melalui berbagai informasi baik dari sumber internal maupun eksternal. Selain itu pendidikan politik juga sangat penting bagi generasi penerus karena dengan pendidikan politik maka kesadaran dan karakteristik politik akan muncul sehingga menumbuhkan budaya politik. Partisipasi sebagai bagian kebudayaan politik akan memperlancar sosialisasi politik. Keberhasilan sosialisasi politik akan mempengaruhi individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Dengan demikian sosialisasi politik dalam kegiatan pemilu mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kesadaran menggunakan hak pilih, sebagai bagian dari partisipasi politik.

Melihat adanya keterhubungan antara sosialisasi politik dengan partisipasi politik, artinya jelas bahwa ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Jika sosialisasi diberikan maka partisipasi akan meningkat dan berjalan dengan baik. Adapun peran dan fungsi sosialisasi politik yaitu sosialisasi politik berperan mengembangkan serta memperkuat sikap politik kalangan warga masyarakat yang sadar politik, yaitu sadar akan hak dan kewajiban

dalam kehidupan bersama. Peranan tersebut melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga tertentu yang ada dalam masyarakat. Adapun fungsi sosialisasi politik antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, hal ini sejalan dengan konsep demokrasi, yaitu pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang berarti rakyat harus berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Berkaitan dengan masih rendahnya sosialisasi politik dan menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Jambi. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang “ **PENGARUH POLITIK TERHADAP PARTISIPASI DALAM PILKADA DI PROVINSI JAMBI** ”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi di Provinsi Jambi dalam pelaksanaan pilkada sebagai berikut:

1. Masih terdapat masyarakat yang golput dalam pilkada di Provinsi Jambi.
2. Kurangnya sosialisasi politik kepada masyarakat di Provinsi Jambi.
3. Sebagian masyarakat Provinsi Jambi memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada menghadiri pemilihan kepala daerah.
4. Sebagian masyarakat Provinsi Jambi belum memiliki pemahaman akan pentingnya Pilkada.

5. Sebagian masyarakat Provinsi Jambi belum memaksimalkan fungsi Pilkada untuk memilih kepala daerah yang berkualitas.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar masalah dalam penelitian ini lebih fokus dari apa yang ingin diteliti, maka penulis membatasi penelitian ini pada permasalahan sebagai berikut:

1. Partisipasi politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan masyarakat secara sukarela dalam pemilihan penguasa khususnya kepala daerah di Provinsi Jambi.
2. Sosialisasi Politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rendahnya sosialisasi politik pada masyarakat atau kurang bervariasinya sosialisasi kepada masyarakat dalam pilkada di Provinsi Jambi.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Terdapat Pengaruh Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pilkada di Provinsi Jambi?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh sosialisasi politik terhadap partisipasi politik dalam pilkada di Provinsi Jambi.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang pengaruh sosialisasi politik terhadap partisipasi politik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembanding, pertimbangan, dan pengembangan bagi penelitian di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Program Studi PPKn khususnya, penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan tentang sistem politik Indonesia dalam kaitannya dengan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
- b. Penelitian ini juga bisa menjadi informasi bagi KPU dan partai politik agar dapat memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.
- c. Penelitian ini kiranya bisa menjadi bahan masukan bagi partai politik dan juga masyarakat, agar dapat mewujudkan pilkada yang demokratis serta berkualitas.

### 1.7 Definisi Operasional

Untuk mempermudah peneliti dalam mengukur variabel yang diteliti, maka dijelaskan definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan masyarakat, dimana masyarakat berperan serta secara aktif dalam pemilihan pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan itu mencakup tindakan politik seperti menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, menghadiri kampanye politik, mengadakan diskusi (*lobby*) dengan politikus atau pemerintah.

#### 2. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan sarana untuk memberitahukan kepada seseorang mengenai konsep dan perkembangan politik serta bagaimana cara berpolitik dengan benar